

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PAJAK**

(Studi kasus pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu

Disusun Oleh :

UUS KURNIA SANDY

NPM : 1112217013



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANGGA BUANA – YPKP
BANDUNG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak (studi kasus pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)

Nama : Uus Kurnia Sandy

NPM : 1112217013

Jenis Kelamin : laki-laki

Fakultas : Ekonomi

Jenjang Program : Sarjana

Program Studi : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

Tempat penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Lama Penelitian : 6 (Enam Bulan)

Telah disetujui oleh Pembimbing dan Penguji
Bandung, 15 Desember 2023

Hetti Herawati, SE., M.Si

Penguji 1

Penguji II

Erik Nugraha, SE., M.Ak

Tevi Leviany, SE., M.Si., Ak

Mengetahui,

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Jenjang Program Sarjana (S1)

(Welly Surjono. SE., M.Si)

(Erik Nugraha, SE., M.Ak)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kelulusan gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandung,2023

Peneliti

Uus Kurnia Sandy

1112217013

ABSTRAK

Modernisasi Administrasi Pajak merupakan salah satu tujuan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat khususnya Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya sehingga wajib pajak dapat termotivasi akan kepatuhan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Modernisasi administrasi perpajakan, mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner jumlah sampel sebanyak 100 orang. Analisis data dilakukan dengan uji regresi berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi telah dilaksanakan dengan cukup baik, modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Motivasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi dinilai memiliki motivasi yang tinggi.

Kata kunci: modernisasi administrasi, motivasi, wajib pajak.

ABSTRACT

Modernization of Tax Administration is one of the aims to make it easier for the public, especially Taxpayers, to be able to carry out their obligations so that taxpayers can be motivated to comply in carrying out their tax obligations. This research aims to determine the modernization of tax administration, determine the effect of modernization of tax administration on taxpayer motivation in fulfilling tax obligations and taxpayer motivation in carrying out their taxation.

The research method used is descriptive quantitative with data collection techniques through distributing questionnaires to a sample size of 100 people. Data analysis was carried out using multiple regression tests, coefficient of determination tests and hypothesis tests.

The results of the research show that the implementation of modernization of tax administration at the Cimahi Pratama Tax Service Office has been implemented quite well, modernization of tax administration has an effect on taxpayer motivation in fulfilling tax obligations. The motivation of taxpayers at the Cimahi Pratama Tax Service Office is considered to have high motivation.

Key words: administrative modernization, motivation, taxpayers.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir pendidikan jenjang Srata 1, serta ucapan terima kasih kepada orang tua atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Dalam Pajak Memenuhi Kewajiban Pajak (studi kasus pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi).

Skripsi ini merupakan sebuah karya saya yang sangat berharga yang dirangkai beberapa tahun. Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah ini; kesendirian, ketidakotentikan, keterasingan, dan ketidakpastian hidup adalah suatu keniscayaan bagi saya, namun (masih) suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya” *kapan skripsimu selesai?*” dan “ *kapan kamu wisuda?*”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktubukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik keterlambatan mereka lulus, dan percayalah alas an saya disini merupakan alas an yang sepenuhnya baik.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa penulis nantikan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Hetti Herawati, SE.,M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang senantiasa membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya Sangga Buana YPKP Bandung.
2. Bapak Dr.Dididn Saepudin, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Bapak Dr.Teguh Nurhadi Suharsono , S.T.,M.T, Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
4. Bapak Bambang Susanto, S.E., M.Si, Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
5. Ibu Nurhaeni Sikki, S.A.P., M.A.P, Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
6. Ibu R. Aryanti Rahmawati, S.E., M.Si., A.k., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
7. Bapak Welly Surjono, SE., M.Si, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
8. Bapak Erik Nugraha, SE., M.Ak, Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

9. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai kepada penulis dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.
10. Kedua orang tua serta Istri dan anak, yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung.
11. Teman – teman Mahasiswa seangkatan terima kasih atas kebersamaannya selama pembelajaran.
12. Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak bisa sampaikan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan menjadi sesuatu yang berharga bagi setiap orang yang membacanya dan menjadi sumber ilmu yang mampu memperkaya pengetahuan.

Bandung, 2023

Penulis

Uus Kurnia Sandy
1112217013

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4.1 Maksud Penelitian.....	5
1.4.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.1 Kegunaan Praktis.....	6
1.5.2 Kegunaan Teoritis.....	6
1.6 Pemikiran dan Hipotesis.....	6

1.6.1	Landasan Teori	6
1.6.2	Hipotesis	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Pajak	11
2.1.1	Definisi <i>Pajak</i>	11
2.1.2	Ciri-Ciri Pajak	12
2.1.3	Fungsi Pajak	12
2.1.4	Jenis Pajak	13
2.1.5	Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.6	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	16
2.1.6.1	Kewajiban Wajib Pajak	16
2.1.6.2	Hak-Hak Wajib Pajak	16
2.2	Modernisasi Administrasi Wajib Pajak	17
2.2.1	Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan..	17
2.2.2	Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	22
2.2.3	Perubahan paradigmp perpajakan	23
2.3	Motivasi Wajib Pajak	24
2.3.1	Pengertian Motivasi	24
2.3.2	Teori Motivasi	25
2.3.3	Indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian	29
3.2	Metode Penelitian	29

4.1.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	55
4.1.3.2 Regresi Linier Sederhana	58
4.1.3.3 Koefisien Korelasi	59
4.1.3.4 Uji Koefisien Determinasi.....	60
4.1.3.5 Pengujian Hipotesis	61
4.2 Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Bobot Penilaian Kuesioner(Pernyataan positif)	31
Tabel 3.2	Operasional variabel.....	35
Tabel 3.3	Interprestasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi.....	40
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir	44
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Mengenai Struktur Organisasi	46
Tabel 4.5	Tanggapan Responden mengenai Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	47
Tabel 4.6	Tanggapan Responden mengenai Sumber Daya Manusia	48
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Good Governance.....	49
Table 4.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Modernisasi Adiministrasi perpajakan	50
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Mengenai Motivasi intrinsik.....	51
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Mengenai Motivasi ekstrinsik.....	53
Table 4.11	Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Motivasi Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi administrasi perpajakan	55
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi wajib pajak	56

Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Variabel X.....	57
Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Variabel Y.....	57
Tabel 4.16 Uji Regresi.....	59
Tabel 4.17 Uji Korelasi	60
Tabel 4.18 Uji koefisien determinasi	60
Tabel 4.19 Uji Hipotesis.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	10
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner Penelitian

Lampiran II Data Ordinal Dan Interval

Lampiran III Hasil Olah Data SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sektor andalan pemerintah, karena pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara saat ini. Hal ini didukung oleh Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun lalu. Berdasarkan data tersebut penerimaan dari sektor pajak memang belum mencapai target yang dianggarkan, akan tetapi penerimaan dari sektor ini sudah tergolong cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan mencapai target penerimaan yang dianggarkan.

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan

yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*).

Tahun 2012 tepat satu dekade Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan program reformasi birokrasi atau disebut juga modernisasi perpajakan. Sejak tahun 2002 DJP telah melakukan berbagai perubahan mendasar, mulai dari restrukturisasi organisasi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan,

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya untuk mencapai target penerimaan pajak dan modernisasi juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan, Dimana ketentuan prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat, Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, penggunaan system informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, modernisasi sistem dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance*.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem

administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*.

Modernisasi Administrasi Pajak merupakan salah satu tujuan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat khususnya Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya kapan dan dimana saja tidak harus datang ke kantor pelayanan pajak sehingga wajib pajak tidak perlu menunggu lama karena antrian yang panjang (*westy Time*) dan tidak terkendala akan jarak ke Kantor pelayanan pajak. Dengan Demikian diharapkan agar wajib pajak dapat termotivasi akan kepatuhan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Self Assessment System*, wajib pajak harus memiliki motivasi yang tinggi dalam membayar kewajiban perpajakannya. Apabila tingkat motivasi wajib pajak rendah, maka hal ini akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan secara otomatis akan mempengaruhi penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu, keaktifan dari wajib pajak memang diperlukan agar sistem ini dapat berjalan dengan semestinya.

Motivasi adalah hal yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan suatu tindakan, jika motivasi wajib pajak tinggi dalam membayarkan kewajiban

pajaknya, maka pembangunan di Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan (Putri, 2016:23). Selanjutnya Menurut Santrock, John. W, (2015:514) indikator dari motivasi wajib pajak adalah pertama:Intrinstik, Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, Kedua: Ekstrisik, Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Penerimaan pajak selama ini belum mencapai target
2. Modernisasi Perpajakan diharapkan biasa menjadi alternative untuk epektivitas, efisiensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
3. Seberapa Besar modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajian Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Modernisasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi?
2. Bagaimana Motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya.
3. Bagaimana Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dalam Penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi sesuai dengan topik yang ditulis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi akuntansi jenjang strata satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Motivasi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
3. Untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan Bagi penulis.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang pelaksanaan system modernisasi administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Untuk dapat menjadi bahan pengetahuan juga wawasan bagi penulis maupun pembaca

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi dikenal melalui tulisan Heider (1958) yang berjudul “*Native Theory of Action*”, yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang. Menurutnya setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuan semu yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan informasi sampai mereka mendapatkan penjelasan masuk akal tentang alasan-alasan orang lain bertingkah laku tertentu. Teori atribusi menyatakan bahwa

bila orang lain mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008).

Teori atribusi relevan dalam menjelaskan perilaku seseorang, dalam hal ini adalah mengenai Motivasi Wajib Pajak (WP). Teori ini menjelaskan faktor internal wajib pajak yaitu pengetahuan Wajib Pajak dan faktor eksternal yaitu modernisasi sistem perpajakan yang berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan suatu bentuk reformasi perpajakan serta perlu melakukan suatu bentuk tindak peningkatan kualitas pelayanan guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang dapat berdampak pada penerimaan Negara. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. Good Governance merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal. Strategi yang ditempuh yaitu

pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada Wajib Pajak. Selain itu juga untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Menurut Rahayu (2009:128), modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut: Pertama : Perubahan Struktur Organisasi dimana dengan struktur organisasi yang tertata dengan baik maka pelayanan dan pengawasan dapat terkontrol dengan baik, yang lebih terarah menjalankan tugasnya masing-masing, Kedua: Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi selain dari struktur harus ditunjang oleh metode. sistem, dan prosedur kerja yang baik pula dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah canggih sehingga dapat memudahkan pekerjaan menjadi lebih efisien dan fektif, Ketiga: Penyempurnaan manajemen SDM karena dengan SDM yang memadai maka proses bias terealisasi, Terakhir: Pelaksanaan Good Governmance, Dimana dalam pelaksanaannya bersifat memonitoring apakah peraturan-peraturan yang telah dibuat itu diimplementasikan dengan benar-sehingga meminimalkan penyimpanga Berdasarkan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu Self Assesment System dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak dan fiskus hanya mengawasi melalui prosedur pemeriksaan saja, maka Wajib Pajak dituntut untuk ikut-serta menyelenggarakan kewajiban perpajakannya dengan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, maka

dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan Memotivasi wajib Pajak Patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Motivasi adalah hal yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan suatu tindakan, jika motivasi wajib pajak tinggi dalam membayarkan kewajiban pajaknya, maka pembangunan di Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan (Putri, 2016:23)

Menurut Menurut Maulida, (2011:57):

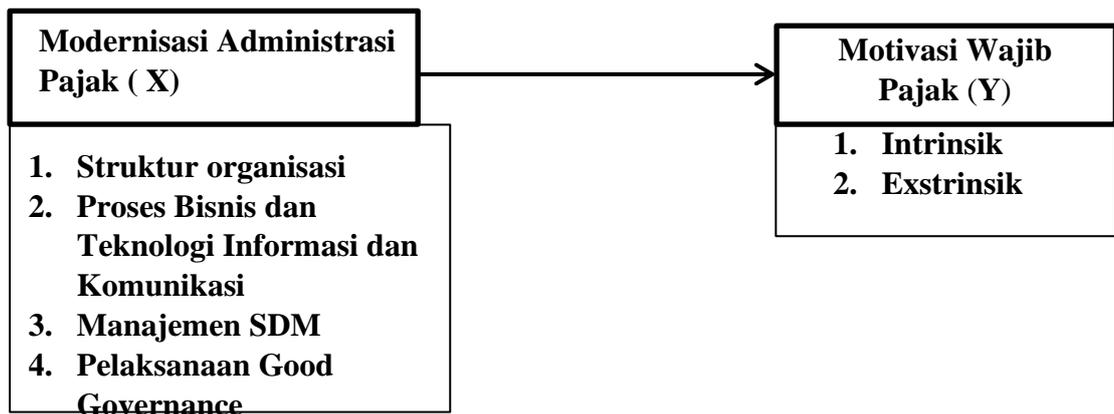
“Motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak wajib pajak untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa sedikitpun dalam benak mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya”.

Menurut Santrock, John. W, (2015:514) indikator dari motivasi wajib pajak sebagai berikut:

1. Intrinsik, Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
 - a) Dorongan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b) Dorongan untuk melaksanakan Setoran Pajak
2. Ekstrisik, Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.
 - a) Dorongan untuk melaksanakan pembukuan
 - b) Dorongan untuk melaksanakan Pemeriksaan

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Modernisasi Administrasi Perpajakan



1.6.2 Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2013)** Hipotesis atau hipotesa adalah:

“jawaban sementara atas permasalahan yang akan diteliti dan disusun serta diuji untuk menunjukkan benar atau tidaknya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti dan pengujinya”.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah *Modernisasi administrasi pajak* dengan indikator (Struktur organisasi, Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, Manajemen sumber daya manusia (SDM), dan Pelaksanaan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi *Pajak*

Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani yang dikutip oleh Diana Sari (2013:34) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk-untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi-defiisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi pajak adalah penerimaan negara yang diperoleh dari uran wajib yang bersifat memaksa terhadap orang pribadi dan badan kepada negara yang diatur dalam UndangUndang dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:10) Ciri-Ciri Pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiaya *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.3 Fungsi Pajak

Diana Sari (2013:37), menyatakan bahwa telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) Pajak sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
- b) Fungsi Mengatur (*Reguler*) Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan.

Sedangkan fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6), sebagai berikut:

- 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.4 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Mardiasmo (2010:5-6), adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut Golongannya.
 - a) **Pajak langsung**, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) **Pajak tidak langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya.
 - a) **Pajak subjektif**, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) **Pajak objektif**, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a) **Pajak pusat**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai
 - b) **Pajak daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - i Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - ii Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. “Sistem *Official Assessment* Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment* Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding* Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sedangkan sistem pemungutan pajak menurut Diana Sari (2013:78), adalah sebagai berikut:

1. *Official-Assessment System* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
2. *Self-Assessment* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib

pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

3. *Withholding system* Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini yaitu pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

2.1.6 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:56), Kewajiban dan Hak Wajib Pajak adalah:

2.1.6.1 Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- f. Jika diperiksa wajib:
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

2.1.6.2 Hak-Hak Wajib Pajak

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k) Mengajukan keberatan dan banding

2.2 Modernisasi Administrasi Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Diana Sari (2013:14) semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change*

program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak.

Menurut Suparman (2007) tentang pengertian sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat

Menurut Diana Sari (2013:14), “Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menurut Liberti Pandiangan (2008:7-8) dan Diana Sari (2013), modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

1. Restrukturisasi organisasi.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal. Strategi

yang ditempuh adalah pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak.

Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan *revolutioner*.

Menurut Diana Sari (2013:14-17), untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1. **Struktur Organisasi**

Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko.

2. **Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan full automation, akan tercipta suatu proses bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap

Wajib Pajak baik dari segi kualitas maupun waktu. Proses bisnis dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada. Perbaikan proses bisnis dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukannya fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. **Manajemen Sumber Daya Manusia**

Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dalam suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua ini tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung dengan SDM yang *capable* dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata

merasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas.

4. **Pelaksanaan *Good Governance***

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut. Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Menurut World Bank (Wahab, 2002:34), *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Bappenas (Solihin, 2007) ada empat belas nilai yang menjadi prinsip *good governance*, yaitu :

- a) Wawasan ke depan (Visionary)
- b) Transparansi (Transparancy)

- c) Partisipasi Masyarakat (Participation)
- d) Akuntabilitas (Accountability)
- e) Supremasi Hukum (Rule of Law)
- f) Demokrasi (Democracy)
- g) Profesionalisme dan kompetensi (Profesionalism and Competency)
- h) Daya Tanggap (Responsiveness)
- i) Efisien dan Efektif (Ef iciency and Ef ectiveness)
- j) Desentralisasi (Decentralization)
- k) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Privat and Civil Partnership)
- l) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
- m) Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Enviromental Protection)
- n) Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)

2.2.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Diana Sari (2013:19), adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah, untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi

3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

2.2.3 Perubahan paradigm perpajakan

Perubahan paradigm perpajakan menurut pandiangan (2008:9) yakni:

1. Organisasi, berubah dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Hal ini dalam rangka *client oriented*;
2. Sistem dan proses kerja, berubah dari manual menjadi berdasarkan system (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SIDJP) dengan *casemanagement*. Hal ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini;

3. Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada wajib pajak (*Customer oriented*) dengan adanya *help desk* maupun *Account Representative (AR)*;
4. Adanya unit khusus yang menangani keluhan (*complain center*) sehingga menjadi masukan berharga dalam merawat dan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan;
5. Tuntutan profesional sumber daya manusia dalam bekerja;

2.3 Motivasi Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Motivasi

Istilah motivasi berasal dari kata Latin “*Motive*” yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang menyebabkan organisme itu bertindak atau berbuat. Selanjutnya diserap dalam bahasa Inggris *motivation* berarti pemberian motif, penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.

Menurut Purwanto (2011:71) “Motivasi adalah dorongan suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu”. Menurut Maulida (2011:57) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban

perpajakan secara teratur dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya.

Berkaitan dengan pengertian motivasi, beberapa psikolog menyebut motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan keinginan, arah, intensitas, dan keajegan perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Dalam motivasi tercakup konsep-konsep, seperti kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu (Hamzah, 2011).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi membayar pajak merupakan suatu dorongan yang timbul baik dari dalam maupun luar diri seseorang yang menggerakkan seseorang/wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan yaitu membayar kewajiban perpajakannya dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2.3.2 Teori Motivasi

Berikut ini ada beberapa teori tentang motivasi, antara lain:

1. Teori Maslow

Teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dalam (Priansa, 2014:205-212) menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda yang disebabkan oleh sebuah dorongan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terbagi menjadi lima tingkatan yaitu:

- a) **Kebutuhan Fisiologis (fisik)** merupakan kebutuhan yang paling dasar yang wajib dipenuhi oleh individu, karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini orang dapat mempertahankan hidupnya. Yang tergolong dalam kebutuhan fisik yaitu makan, minum maupun bernafas
- b) **.Kebutuhan Keamanan/perlindungan.** Kebutuhan yang dimaksudkan yaitu perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan akan fisik semata, namun juga membutuhkan kebutuhan akan mental, psikologikal dan intelektual dalam hal ini yaitu rasa aman.
- c) **Kebutuhan akan kebersamaan (kebutuhan sosial).** Walaupun kebutuhan fisik dan kebutuhan keamanan telah terpenuhi, akan tetapi kebutuhan sosial tidak kalah penting. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Mereka mempunyai kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Dengan demikian kebutuhan sosial juga penting agar mereka dapat menjalankan hidup bermasyarakat dengan baik.
- d) **Kebutuhan akan Harga Diri atau penghargaan.** Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain dalam lingkungannya.

- e) Kebutuhan Aktualisasi diri. Manusia juga memiliki kebutuhan untuk dapat menggunakan kemampuan, skill, potensi, maupun kebutuhan untuk mengemukakan ide, pendapat, penilaian maupun saran.

2. Teori Motivasi Harapan-Victor Vroom

Teori ini dikemukakan oleh Victor Vroom yang berpendapat bahwa kekuatan untuk melakukan suatu tindakan dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu pengharapan (Istanto, 2010:39). Berdasarkan teori pengharapan menyebutkan bahwa seorang karyawan dimotivasi untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan baik, apabila pekerjaan yang telah mereka lakukan baik dan mendapatkan penilaian kinerja yang baik, maka akan mendorong mereka mendapatkan imbalan seperti bonus, kenaikan gaji, atau promosi dan ganjaran itu akan memuaskan tujuan pribadi karyawan tersebut. Dengan adanya suatu kekuatan dalam diri manusia untuk memperoleh suatu harapan dalam hal ini bonus, promosi maupun kenaikan gaji, maka manusia akan lebih termotivasi untuk lebih giat atau benar ketika menjalankan suatu pekerjaan.

3. Teori Herzberg's Model

Teori tersebut dikemukakan oleh Frederick Herzberg dalam Siagian (2011:146) yang menyebutkan tentang *Two Factor View* yaitu:

- a. Faktor Motivator, merupakan hal-hal pendorong berprestasi yang bersifat ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri seseorang.

Contoh faktor motivasi yaitu prestasi, pengakuan itu sendiri, tanggung jawab, kesempatan dan penghargaan.

- b. Hygiene, yaitu faktor-faktor yang sifatnya menyenangkan para pekerja. Contohnya upah atau gaji, interpersonal dan kebijakan perusahaan.

2.2.3 Indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak

Herzberg mengemukakan sebuah teori yang disebut Teori Dua Faktor, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor *hygiene* atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Begitu pula dalam hal perpajakan, terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Indikator motivasi wajib pajak menurut Santrock, John. W, (2015:514) indikator dari motivasi wajib pajak sebagai berikut:

1. intrinstik, Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
 - a) Dorongan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b) Dorongan untuk melaksanakan Setoran Pajak

2. Ekstrisik, Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.
 - a) Dorongan untuk melaksanakan pembukuan
 - b) Dorongan untuk melaksanakan pemeriksaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu) Sugiyono (2017:41)

Objek penelitian penulis adalah modernisasi administrasi perpajakan (Variabel Independen) Dan Motivasi membayar pajak (Variabel Dependen). Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner dan data pendukung lainnya. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan asosiatif.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2017:35) adalah :

“Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”.

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang

sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, diman data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Sedangkan metode asosiatif menurut sugiyono(2017:37) adalah:

“Suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih”.

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variable atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan data primer.

Menurut sugiyono(2017:137) Mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut:

“Sumber Primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

3.3.2 Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Primer. Menurut Sugiyono(2017:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Cimahi .

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Menurut sugiyono (2017:142) teknik pengumpulan data kuesioner dan angket adalah teknik pengumpulan data yang dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner disusun dengan menggunakan skala *likert*

Menurut Sugiyono (2017:93) yang dimaksud dengan Skala *Likert* adalah sebagai berikut:

“Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dalam penelitian dan Fenomea social ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneliti,”

Dalam penelitian ini, menggunakan SPSS untuk memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat menganalisis perumusan masalah peneliti. Masing-masing jawaban dari 5 alternatif jawaban yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) Sebagai berikut:

Tabel 3.1

Bobot Penilaian Kuesioner(Pernyataan positif)

NO	KETERANGAN	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju(TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono(2017:80) Pengertian Populasi adalah Sebagai Berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :Objek/Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi Dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi sebanyak 191.364 wajib pajak.

3.4.2 Sample

Menurut sugiyono(2017:62) Menyatakan bahwa Sample adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan aspek-aspeknya, sample adalah bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sample.

Penentuan jumlah sample yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagaimana tertera dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n :Jumlah Sample

N :Jumlah Populasi

e :*Standar error* atau persen kelonggaran 10% (0,1)

Maka jumlah sampelnya adalah:

$$n = \frac{191.364}{1 + 191.364 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{191.364}{1914,64}$$

$$n = 99,94 \approx 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka sample minimal yang dapat digunakan adalah 100 responden.

Menurut Sugiyono (20017:62) Teknik sampling merupakan teknik pengumpulan. Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu *non probability sampling* Menurut Sugiyono (2015: 122) *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi sampel, sedangkan teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *insidental sampling*. *Insidental Sampling* merupakan penentuan sampel yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti yang dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2015: 124).

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

3.5.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2015:61). Variabel dependen (terikat) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Motivasi Membayar Pajak merupakan suatu dorongan yang timbul baik dari dalam maupun luar diri seseorang yang menggerakkan seseorang atau wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan yaitu

membayarkan kewajiban perpajakannya dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang.

3.5.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono,2015:61).

Variabel bebas Modernisasi administrasi perpajakan (X) dikembangkan dari pernyataan yang dikemukakan oleh Diana Sari (2013:14-17) terdiri dari:

1. Struktur Organisasi yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan dimana untuk mengatasi masalah-masalah organisasi.
2. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting yang di arahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
3. Sumber Daya Manusia , hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dalam suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua ini tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung dengan SDM yang *capable* dan berintegritas.
4. *Pelaksanaan Good Governance*, dimana seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Tujuannya untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam organisasi.

Tabel 3.2 operasional variabel

Variable	Konsep Variable	Indikator	Skala	Instrumen
Variable Independen: Modernisasi Administrasi Perpajakan(X)	Menurut Diana Sari (2013:14), “Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”	a. Struktur Organisasi b. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi c. Sumber Daya Manusia d. <i>Pelaksanaan Good Governance</i> Diana Sari (2013:14-17)	O R D I N A L	K U E S I O N E R
Variable Dependen: Motivasi wajib pajak (Y)	Menurut Maulida (2011:57) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan sesuatu	a.Motivasi Intrinsik b.Motivasi Ekstrinsik Santrock, John. W (2015:514)	O R D I N A L	K U E S I O N

	yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya.			E R
--	---	--	--	--------

3.6 Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Sebelum kuesioner dibagikan, maka diperlukan terlebih dahulu pengujian validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh dari responden menjadi lebih valid dan reliabel. Berikut ini penjelasan uji validitas dan uji reliabilitas :

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa tepat instrumen tersebut mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran sebenarnya yang ingin diukur oleh peneliti (Mustofa, 2009:164). Teknik korelasi yang digunakan dalam uji validitas pada penelitian ini yaitu *Product Moment* dari *Pearson* dengan rumus perhitungan sebagai berikut (Umar, 2008:166) :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x \sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan

r_{xy} : koefisien korelasi *product moment*

N : jumlah responden

X : skor butir item tertentu

Y : skor total

$\sum X$: Jumlah skor butir

$\sum y$: Jumlah skor Total

$\sum Xy$: Jumlah perkalian skor butir dan skor total

$\sum x^2$: Jumlah Kuadrat skor butir

$\sum Y^2$: jumlah kuadrat skor total

Uji validitas pada penelitian ini, menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a) Apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen berkorelasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan valid.
- b) Apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Mustofa, 2009:224). Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal, apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47).

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Rumus perhitungan *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

$$R_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_b^2}{S_t^2} \right)$$

dimana:

R_{11} = Reabilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

S_t^2 = Deviasi standar total

$\sum S_b^2$ = Jumlah deviasi standar butir

Dalam pengujian reliabilitas, sebuah keputusan dapat diambil dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*, apabila nilai tersebut lebih dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dinyatakan reliabel, sebaliknya apabila nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dianggap tidak reliabel (Ghozali, 2006).

3. Method Of Successive Interval (MSI)

Analisis Method Of Successive Interval (MSI) digunakan untuk mengubah data yang berskala ordinal menjadi skala interval. Method Of Successive Interval (MSI) menurut Sugiyono (2013:25), langkah-langkah dilakukan dalam MSI sebagai berikut :

1. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebar
2. Pada setiap butir ditentukan beberapa orang yang mendapatkan skor 1,2,3,4,5 dan dinyatakan dalam frekuensi
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi

4. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor
5. Gunakan tabel distribusi normal, dihitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh
6. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap Z yang diperoleh (dengan menggunakan tabel densitas)
7. Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus :

SV= Kepadatan batas bawah - Kepadatan batas atas Daerah dibawah
batas atas - Daerah dibawah batas bawah.

$$SV = \frac{\text{Kepadatan batas bawah} - \text{Kepadatan Batas Atas}}{\text{Daerah di bawah Batas Atsa} - \text{Daerah di Bawah Batas Bawah}}$$

3.7 Analisis Data

Analisi data menurut sugiyono (2011:147) merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara Variabel(Variabel X dan Variabel Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak.

3.7.1 Uji Normalitas

Menurut **Duwi Priyatno (2012:144)** pengertian dari uji normalitas adalah:

“Uji normalitas adalah untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal”.

3.7.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) yaitu Modernisasi Administrasi Pajak terhadap variabel terikat (Y) yaitu Motivasi Membayar Pajak secara parsial.

1. Bentuk persamaan regresi linear sederhana yaitu :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y : Motivasi Membayar Pajak

a : Bilangan konstanta

b : koefisien regresi

X : Modernisasi administrasi pajak.

Selanjutnya nilai a dan b didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Umar, 2011 :114) :

$$a = \frac{\sum y(\sum x^2) - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (*b*). Nilai koefisien regresi bisa positif atau negatif. Nilai koefisien positif artinya jika variabel independen naik maka variabel dependen naik dan sebaliknya jika variabel independen turun, maka nilai variabel dependen juga turun.

3.7.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi dapat digunakan yang bersifat asosiatif, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan signifikan hubungan antara dua variabel (Hariwijaya dan triton,2011:86). Kekuatan hubungan antar variabel dapatdiketahui berdasarkan nilai r hasil analisis korelasi. Nilai r dapat dicari dengan rumus korelasi *product moment pearson* (Hariwijaya dan triton,2011:88). Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian iniadalah *bivariate correlation* yang sering disebut dengan *oduct moment pearson* berguna untuk menguji kedua korelasi antar kedua variabel. Didalam melakukan uji korelasi perlu diperhatikan *test of significance*. Nilai korelasi apabila dikuadratkan akan menghasilkan nilai koefisien diterminasi (wijaya,2012:90) selanjutnya besar nilai r dapat diinterpretasi untuk memperkirakan kekuatan hubungan korelasi, seperti ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Interprestasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi

Interval nilai r*)	Interprestasi
0.002 - 0.200	Korelasi Sangat Lemah
0.201 - 0.400	Korelasi Lemah
0.401 - 0.600	Korelasi Cukup Kuat
0.601 - 0.800	Korelasi Kuat
0.801 - 1.000	Korelasi Sangat Kuat

*) interprestasi berlaku untuk nilai r positif maupun negatif
Sumber: Hariwijaya dan Triton (2011:89)

3.8 Uji Hipotesis

Rancangan uji hipotesis untuk mengetahui korelasi dari dua variable yang diteliti, dalam lingkup penelitian ini adalah Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap motivasi wajib pajak. Langkah-langkah dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan hipotesis

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian diatas, maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk di uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H_0) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternative (H_a) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima dengan perumusan sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$ Tidak ada pengaruh signifikan antara Modernisasi administrasi pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

$H_a: \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh signifikan antara Modernisasi administrasi pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2. Menetapkan tingkat signifikan probabilitas sebesar 5% ($\alpha=0.05$)

3. Melakukan pengujian statistic untuk menguji hipotesis, dengan cara:

Membandingkan t_{hitung} dengan t_{table} .

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0.05$)

dengan df (derajat kebebasan) = (jumlah sampel -2) .

4. Kriteria penetapan hipotesis

a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

b) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

5. Statistik uji t

Digunakan untuk pengujian apakah variable bebas mempunyai peranan terhadap variable terkait. Uji t ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = rs \sqrt{\frac{n-2}{t-rs^2}}$$

Dengan $df = n-2$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak. Adapun yang menjadi gambaran umum responden meliputi usia, jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. Kuesioner disebarakan sebanyak 100 eksemplar untuk 100 orang responden.

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden dalam penelitian ini, berikut akan diuraikan pengelompokkan responden berdasarkan: usia, jenis kelamin, penghasilan perbulan dan pekerjaan. Dari 100 responden yang diteliti, maka dapat diketahui karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
21 - 30 tahun	9	9.0
31 - 40 tahun	27	27.0
41- 50 tahun	39	39.0
>51 tahun	25	25.0
Total	100	100%

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dari 100 orang responden yang menjadi objek penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia antara 41- 50

tahun yaitu sebanyak 39.0%, 21 - 30 tahun sebanyak 9.0%, 31 - 40 tahun sebanyak 27.0% sedangkan responden >51 tahun sebanyak 25%. Dengan demikian responden yang berusia antara 41 – 50 tahun cenderung lebih banyak yang mengunjungi KPP Cimahi.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	7624	76.0
Perempuan	24	24.0
Total	100	100%

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dari 100 orang responden yang menjadi objek penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 76.0% sedangkan perempuan 24.0%. Dengan demikian laki-laki cenderung lebih banyak yang mengunjungi KPP Cimahi.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Profesi	Frekuensi	Persentase (%)
SMA/SMK	7	7.0
Diploma	16	16.0
Sarjana	32	32.0
Magister	25	25.0
Lainnya	20	20.0
Total	100	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dari 100 orang responden yang menjadi objek penelitian, responden yang mempunyai Pendidikan terakhir SMA sebanyak 7%, Diploma sebanyak 16.0%, Sarjana sebanyak 32.0%, Magister 25%, dan lainnya sebanyak 20.0%, dengan demikian mayoritas responden mempunyai pendidikan terakhir sebagai Sarjana.

Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka kriteria penilaian dari jawaban responden dibuat sebagai berikut:

Sangat setuju (SS)	diberi bobot nilai 5
Setuju (S)	diberi bobot nilai 4
Cukup setuju (CS)	diberi bobot nilai 3
Tidak setuju (TS)	diberi bobot nilai 2
Sangat Tidak setuju (STS)	diberi bobot nilai 1

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka digunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Di mana :

P = Panjang kelas interval

Rentang = Data terbesar – data terkecil

Banyak kelas = 5

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang kelas interval adalah :

$$P = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut :

1.00 – 1.80 = Sangat Rendah / Sangat Tidak Setuju

1.80 – 2.60 = Rendah / Tidak Setuju

2,60 – 3,39 = Cukup Tinggi /Cukup Setuju

3.40 – 4.20 = Tinggi / Setuju

4.20 – 5.00 = Sangat Tinggi / Sangat Puas

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Berikut tanggapan responden mengenai modernisasi Adiministrasi perpajakan KPP Cimahi yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4

Tanggapan Responden Mengenai Struktur Organisasi

No	Pernyataan	SS 5	S 4	CS 3	TS 2	STS 1	jml	Rata-rata
1	Struktur Organisasi pada KPP Pratama Cimahi yang modern telah berubah berdasarkan fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi. Dengan adanya fungsi tersebut memudahkan jalur penyelesaian dan pemeriksaan wajib pajak	14	52	8	12	14	340	3,40
2	Adanya <i>Account Representative</i> benar benar melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.	18	43	19	7	13	346	3,46

	Jumlah	32	95	27	19	27	686	6,86
	Total	160	380	81	38	27	686	3,43
	Persentase	23,32	55,39	11,81	5,54	3,94	100	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 23,32% menyatakan sangat setuju, 55,39% menyatakan setuju, 11,81% menyatakan cukup setuju, 5,54 % menyatakan tidak setuju dan 3,94% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian variabel modernisasi administrasi perpajakan mengenai struktur organisasi sudah memadai hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,43 yang berada pada interval 3,40 – 4,19, hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi pada KPP Cimahi sudah berjalan dengan baik.

Tabel 4.5

Tanggapan Responden mengenai Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Pernyataan	SS 5	S 4	CS 3	TS 2	STS 1	jml	Rata-rata
3	Pembayaran secara on-line (<i>teller bank, interest banking, ATM</i>) memudahkan Wajib Pajak karena prosesnya cepat	14	46	13	14	13	334	3,34
4	Sistem Pelaporan Pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak	11	32	23	5	29	291	2,91
	Jumlah	25	78	36	19	42	625	6,25

	Total	125	312	108	38	42	625	3,13
	Persentase	20,00	49,92	17,28	6,08	6,72	100	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 20,0% menyatakan sangat setuju, 49,92% menyatakan setuju, 17,28% menyatakan cukup setuju, 6,08% menyatakan tidak setuju dan 6,72% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian variabel modernisasi administrasi perpajakan mengenai proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi di KPP Cimahi sudah berjalan cukup baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,13 yang berada pada interval 2,60 – 3,39.

Tabel 4.6

Tanggapan Responden mengenai Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	SS 5	S 4	CS 3	TS 2	STS 1	jml	Rata-rata
5	Adanya kejujuran pegawai KPP Pratama Cimahi (ketepatan dan ketegasan) dalam penetapan undang undang perpajakan	14	45	18	13	10	340	3,40
6	Pegawai KPP Pratama Cimahi memberikan pelayanan yang sama terhadap Semua Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang)	15	49	10	11	15	338	3,38

	Jumlah	29	94	28	24	25	678	6,78
	Total	145	376	84	48	25	678	3,39
	Persentase	21,39	55,46	12,39	7,08	3,69	100	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 21,39% menyatakan sangat setuju, 55,46% menyatakan setuju, 12,39% menyatakan cukup setuju, 7,08% menyatakan tidak setuju dan 3,09% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian variabel modernisasi administrasi perpajakan mengenai sumber daya manusia di KPP Cimahi cukup memadai, hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,39 yang berada pada interval 2,60 – 3,39.

Tabel 4.7

Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Good Governance

No	Pernyataan	SS 5	S 4	CS 3	TS 2	STS 1	jml	Rata-rata
7	<i>Compliance Centre</i> memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak	18	43	23	9	7	356	3,56
8	Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu (pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat, birokrasi lancar/tidak berbelit belit	17	44	21	10	8	352	3,52
	Jumlah	35	87	44	19	15	708	7,08

	Total	175	348	132	38	15	708	3,54
	Persentase	24,72	49,15	18,64	5,37	2,12	100	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 24,72% menyatakan sangat setuju, 49,15% menyatakan setuju, 18,64% menyatakan cukup setuju, 5,37% menyatakan tidak setuju dan 2,12% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian variable modernisasi administrasi perpajakan untuk pelaksanaan good governance di KPP Cimahi dikatakan sudah baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,54 yang berada pada interval 3,40 – 4,19.

Table 4.8

Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Modernisasi Adiministrasi perpajakan

NO	SS	S	CS	TS	STS	jml	Rata-rata
1	14	52	8	12	14	340	3,40
2	18	43	19	7	13	346	3,46
3	14	46	13	14	13	334	3,34
4	11	32	23	5	29	291	2,91
5	14	45	18	13	10	340	3,40
6	15	49	10	11	15	338	3,38
7	18	43	23	9	7	356	3,56
8	17	44	21	10	8	352	3,52
Jumlah	121	354	135	81	109	2697	26,97
Total	605	1416	405	162	109	2697	3,37
persentas e	22,43	52,50	15,02	6,01	4,04	100	

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai 3,37 yang berada pada interval 2,60 – 3,39. Dari analisis yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Cimahi telah dilaksanakan dengan cukup baik dan memenuhi unsur-unsur teori modernisasi administrasi perpajakan.

4.1.2.2 Motivasi Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Pajak

Berikut tanggapan responden terhadap Motivasi Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Pajak KPP Cimahi yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Mengenai Motivasi intrinsik

No	Pernyataan	SS 5	S 4	CS 3	TS 2	STS 1	jml	Rata-rata	Ket
1	melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku	14	50	8	13	15	335	3,35	Cukup baik
2	melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan timbul dari kesadaran sendiri	18	44	21	10	7	356	3,56	Baik
3	berusaha untuk memahami semua	14	50	13	12	11	344	3,44	Baik

	ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan								
4	bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak	14	50	13	13	10	345	3,45	Baik
	Jumlah	60	194	55	48	43	1380	13,80	
	Total	300	776	165	96	43	1380	3,45	Baik
	Persentase	21,74	56,23	11,96	6,96	3,12	100		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 21,74% menyatakan sangat setuju, 56,23% menyatakan setuju, 11,96% menyatakan cukup setuju, 6,96% menyatakan tidak setuju dan 3,12% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian variable motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak untuk indicator motivasi intrinsik di KPP Cimahi dikatakan baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,45 yang berada pada interval 3,40 – 4,19.

Tabel 4.10

Tanggapan Responden Mengenai Motivasi ekstrinsik

No	Pernyataan	SS 5	S 4	CS 3	TS 2	STS 1	jml	Rata-rata	Ket
5	Dengan membayar	14	51	11	13	11	344	3,44	Baik

	pajak berarti saya telah ikut mewujudkan sistem gotong royong nasional								
6	Dengan membayar pajak, maka saya telah ikut membantu dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan	14	46	13	14	13	334	3,34	Cukup baik
7	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang telah dihitung adalah hal yang sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan	17	41	22	10	10	345	3,45	Baik
8	Akan ada banyak manfaat yang bisa saya rasakan jika saya memenuhi kewajiban perpajakan	12	44	20	14	10	334	3,34	Cukup baik
	Jumlah	57	182	66	51	44	1357	13,57	

	Total	285	728	198	102	44	1357	3,39	Cukup baik
	Persentase	21,00	53,65	14,59	7,52	3,24	100		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 21,00% menyatakan sangat setuju, 53,65% menyatakan setuju, 14,59% menyatakan cukup setuju, 7,52% menyatakan tidak setuju dan 3,24% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian variable motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak untuk indikaotr ekstrinsikdi KPP Cimahi dikatakan cukup baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,39 yang berada pada interval 2,40 – 3,39.

Tabel 4.11

Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Motivasi Wajib Pajak

NO	SS	S	CS	TS	STS	jml	Rata-rata
1	14	50	8	13	15	335	3,35
2	18	44	21	10	7	356	3,56
3	14	50	13	12	11	344	3,44
4	14	50	13	13	10	345	3,45
5	14	51	11	13	11	344	3,44
6	14	46	13	14	13	334	3,34
7	17	41	22	10	10	345	3,45
8	12	44	20	14	10	334	3,34
Jumlah	117	376	121	99	87	2737	27,37
Total	585	1504	363	198	87	2737	3,42
persentas e	21,37	54,95	13,26	7,23	3,18	100	

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai motivasi wajib pajak memiliki nilai 3,42 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Dari analisis yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi wajib pajak di KPP Cimahi telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi unsur-unsur teori motivasi wajib pajak.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor masing-masing variabel. Validitas di definisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Oleh karena itu, penulis menguji tingkat validitas kuesioner yang disebarakan kepada para responden. Hasil uji validitas digunakan dengan bantuan Program SPSS, masing - masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi administrasi perpajakan

Item	Indeks validitas	Nilai kriteria	Keterangan
VAR00001	,847	0,1966	Valid
VAR00002	,726	0,1966	Valid
VAR00003	,708	0,1966	Valid
VAR00004	,565	0,1966	Valid
VAR00005	,316	0,1966	Valid
VAR00006	,848	0,1966	Valid
VAR00007	,687	0,1966	Valid
VAR00008	,754	0,1966	Valid

Sumber data sudah diolah

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi wajib pajak
Item-Total Statistics

Item	Indeks validitas	Nilai kriteria	Keterangan
VAR00001	,945	0,1966	Valid
VAR00002	,612	0,1966	Valid
VAR00003	,935	0,1966	Valid
VAR00004	,953	0,1966	Valid
VAR00005	,908	0,1966	Valid
VAR00006	,900	0,1966	Valid
VAR00007	,567	0,1966	Valid
VAR00008	,862	0,1966	Valid

Sumber data sudah diolah

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item pernyataan dengan total skor yang diperoleh lebih besar dari 0,1966 sehingga dapat dijelaskan bahwa item pernyataan yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya. Hasil uji validitas dapat diartikan bahwa pernyataan responden dapat dikatakan valid dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, langkah yang ditempuh yaitu sama dengan langkah pengujian validitas. Karena output keduanya bersamaan muncul. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS:

Tabel 4.14
Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,895	,896	8

Sumber data sudah diolah

Tabel 4.15
Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,956	,955	8

Sumber data sudah diolah

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliabel karena nilai koefisien reliabilitas $r > 0,70$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang sangat tinggi, yaitu 0,896 dan 0,905, dengan demikian dapat dikatakan semua item pernyataan reliabel artinya pernyataan yang diberikan dapat diandalkan dan mudah dipahami oleh responden.

4.1.3.2 Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui modernisasi administrasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,591	1,054		4,357	,000
	Modernisasi A_P	,818	,037	,913	22,211	,000

a. Dependent Variable: Motivasi_WP

Sumber data sudah diolah

Model diatas regresi linier sederhana yang biasa dibentuk dari variabel yang ada pada Tabel 4.16 dapat diformulasikan dalam model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4,591 + 0,818X$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan :

- a. Jika α = konstanta sebesar 4,591 artinya apabila variabel independen yaitu modernisasi administrasi perpajakan dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel motivasi wajib pajak akan bernilai sebesar 4,591.

- b. Jika nilai koefisien regresi variabel modernisasi administrasi perpajakan menunjukkan nilai sebesar 0,818, artinya apabila variabel modernisasi administrasi perpajakan mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, maka variabel dependen yaitu variabel motivasi wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,818.

4.1.3.3 Koefisien Korelasi

Untuk mengetahui hubungan modernisasi administrasi perpajakan dengan motivasi wajib pajak, dicari dengan bantuan SPSS. Berikut adalah hasil perhitungan korelasi:

Tabel 4.17

Uji Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,913 ^a	,834	,833	3,08206

a. Predictors: (Constant), Modernisasi_perpajakan

Sumber data sudah diolah

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diatas, maka diperoleh nilai r sebesar 0,913, modernisasi administrasi perpajakan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang berada pada interval 0,80 – 1,00, artinya terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel modernisasi administrasi perpajakan dengan variabel motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak.

4.1.3.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R^2

Tabel 4.18

Uji koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,913 ^a	,834	,833	3,08206

a. Predictors: (Constant), Modernisasi_perpajakan

Sumber data sudah diolah

Besarnya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak berdasarkan nilai r square yaitu 0,834 atau 83,4%, maka besarnya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sebesar 83,4% dan sisanya sebesar 14,6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti penerapan kualitas layanan petugas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang baik dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

4.1.3.5 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji t dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0: \beta = 0$ Tidak ada pengaruh signifikan antara Modernisasi administrasi pajak terhadap motivasi wajib pajak .

Ha: $\beta \neq 0$ Terdapat pengaruh signifikan antara Modernisasi administrasi pajak terhadap motivasi wajib pajak.

Kriteria uji :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak terdapat pengaruh antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, terdapat pengaruh antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk menentukan t_{hitung} digunakan dengan bantuan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.19 Uji Hipotesis

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4,591	1,054		4,357	,000
	Modernisasi A_P	,818	,037	,913	22,211	,000

a. Dependent Variable: Motivasi_WP

Sumber data sudah diolah

Dari tabel di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 22,211 yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Sedangkan t_{tabel} dapat dilihat pada Tabel t untuk data 98 dengan nilai sig. 0,05 sebesar 1,985.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} 22,211 > t_{tabel} 1,985$ yang berarti H_0 ditolak dan

Ha diterima atau Modernisasi administrasi pajak dengan indikator (Struktur organisasi, Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, Manajemen sumber daya manusia (SDM), dan Pelaksanaan good governance) berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

4.2. Pembahasan

- 4.2.1 Tanggapan wajib pajak menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dinyatakan cukup baik karena mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,37 yang berada pada interval 2,60 – 3,40. Maka Modernisasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi dapat dikatakan cukup baik.
- 4.2.2 Motivasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya dinyatakan baik karena mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,42 yang berada pada interval 3,40 – 4,19.
- 4.2.3 Hasil uji statistik menunjukkan adanya pengaruh antara modernisasi administrasi perpajakan (X) dengan motivasi wajib pajak (Y) sebesar 0,913 atau dinyatakan sangat kuat karena berada pada interval 0,800 – 1,00. Penelitian ini mendukung teori atribusi yang relevan dalam menjelaskan perilaku seseorang, mengenai Motivasi Wajib Pajak (WP). Teori ini menjelaskan faktor internal wajib pajak yaitu pengetahuan Wajib Pajak dan faktor eksternal yaitu modernisasi sistem perpajakan yang berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

1. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan nilai rata-rata 3,37 yang termasuk kategori cukup.
2. Motivasi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi dinilai memiliki motivasi yang tinggi dengan nilai rata-rata 3,42 yang termasuk kategori tinggi.
3. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi sebesar 83,4%. sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 22,211 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,985, dengan demikian hipotesis dapat diterima atau Modernisasi administrasi pajak dengan indikator (Struktur organisasi, Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, Manajemen sumber daya manusia (SDM), dan Pelaksanaan *good governance*) berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang didapat maka saran yang dapat dikemukakan antara lain

1. Diharapkan bagi pihak KPP Pratama Cimahi untuk lebih meningkatkan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan sistem pelaporan pajak elektronik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan lebih memahami penggunaan system, tujuan, serta manfaat lainnya dalam penerapannya sehingga Wajib Pajak akan lebih termotivasi lagi menggunakan system ini serta melakukan perbaikan pada server agar memudahkan penginputan data dan bisa dilakukan lebih cepat tanpa mengalami gangguan.
2. Wajib pajak hendaknya melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyadari sepenuhnya kewajiban Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak untuk kelangsungan pembangunan negara dan juga wajib pajak harus membayar dan melaporkan pajak tepat waktu agar tidak dekenai sanksi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, Oentara Arabella dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review, Vol 1.No 1.2013*
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah B Uno. (2011). *Teori, Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariwijaya dan Triton. (2011). *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Oryza
- Husein Umar. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Istanto, Feri (2010). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*.
- Mardiasmo (2010) *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida, A.N. (2011). Pengaruh Penyuluhan, Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Uang Pajak oleh Pemerintah Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan”. *Jurnal Akuntansi. Jakarta: UIN Jakarta*
- Mustofa, Bisri. (2009), *Pedoman Menulis Proposal Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta. : Panji Pustaka.
- Pandiangan, Liberty. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Priansa, Donni Juni. (2014). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET
- Purwanto, Ngalim. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Bandung : Rosda
- Putri, Kadek Juniati; Setiawan, Putu Ery. (2016) Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 1112-1140, feb. 2017. ISSN 2302-8556.

- Rahayu, Siti Kurnia, (2009), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Robbins, Stephen P., (2008), *Perilaku Organisasi (alih bahasa Drs. Benjamin. Molan)*, Edisi Bahasa Indonesia, PT Intan Sejati
- Santrock, J. W. (2012). *Life Span Development : Perkembangan Masa Hidup* Jilid I. (B. Widyasinta, Penerj.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Wijaya, Ariyadi. (2012). *Pendidikan Matematika Realistik, Suatu Alternatif Pendekatan Pembelajaran Matematika* . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kuesioner

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK (Studi kasus pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)

A. Pernyataan Umum

Keterangan : () Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan jawaban yang

Bapak/Ibu anggap benar.

1. Usia : Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan Laki-Laki
4. Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2

B. Pernyataan Khusus

Petunjuk Pengisian :

1. Daftar pernyataan diisi dengan cara memberi tanda *checklist* (√) pada salah satu alternatif pilihan.
2. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat bapak/Ibu :
 - 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 - 2 = Tidak Setuju (TS)
 - 3 = Netral (N)
 - 4 = Setuju (S)
 - 5 = Sangat Setuju (SS)
3. Bila ada pembatalan jawaban dari jawaban semula, maka jawaban semula cukup diberi tanda (X) kemudian diberi tanda *checklist* (√) pada jawaban pengganti.

Kuesioner Modernisasi

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Cukup setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
	Struktur organisasi					
1	Struktur Organisasi pada KPP Pratama Cimahi yang modern telah berubah berdasarkan fungsi pelayanan pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi. Dengan adanya fungsi tersebut memudahkan jalur penyelesaian dan pemeriksaan wajib pajak					
2	Adanya <i>Account Representative</i> benar benar melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
	Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi					
3	Pembayaran secara on-line (<i>teller bank, internet banking, ATM</i>) memudahkan Wajib Pajak karena prosesnya cepat					
4	Sistem Pelaporan Pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak					
	Sumber Daya Manusia					
5	Adanya kejujuran pegawai KPP Pratama Cimahi (ketepatan dan					

	ketegasan) dalam penetapan undang undang perpajakan					
6	Pegawai KPP Pratama Cimahi memberikan pelayanan yang sama terhadap Semua Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang)					
	Pelaksanaan Good Governance					
7	<i>Compliance Centre</i> memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak					
8	Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu (pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat, birokrasi lancar/tidak berbelit belit					

Kuesioner Motivasi Wajib Pajak

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Cukup setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
	Motivasi intrinsik					
1	melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku					
2	melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan timbul dari kesadaran sendiri					
3	berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan					
4	bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak					
	Motivasi ekstrinsik					
5	Dengan membayar pajak berarti saya telah ikut mewujudkan sistem gotong royong nasional					
6	Dengan membayar pajak, maka saya telah ikut membantu dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan					
7	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang telah dihitung adalah hal yang sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan					

8	Akan ada banyak manfaat yang bisa saya rasakan jika saya memenuhi kewajiban perpajakan							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabulasi Jawaban Responden

Modernisasi Adminstrasi (X)

No	1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	4	4	5	4	4	4	4
2	4	4	2	4	5	4	4	4
3	3	3	2	4	4	3	3	3
4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	2	4	4	4	4	4
6	4	4	5	5	4	4	4	4
7	2	2	3	1	4	2	2	2
8	2	2	3	1	3	2	2	2
9	1	1	2	1	5	1	1	1
10	1	1	1	1	4	1	1	1
11	1	1	1	1	4	1	1	1
12	2	1	2	1	2	2	2	2
13	2	2	2	3	2	2	2	2
14	2	1	2	1	1	2	2	2
15	3	3	3	1	1	3	3	3
16	1	1	3	1	1	1	1	1
17	4	4	4	4	2	4	4	4
18	4	4	4	4	2	4	4	4
19	4	4	4	5	2	4	4	4
20	4	4	4	3	3	4	4	4
21	4	4	4	3	1	4	4	4
22	1	1	1	1	4	1	1	1
23	1	1	1	1	4	1	1	1
24	4	4	4	3	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4
26	5	5	5	5	4	5	5	5
27	4	4	4	3	4	4	4	4
28	5	3	5	4	4	5	3	3
29	4	4	4	1	5	4	4	4
30	4	3	4	5	3	4	3	3
31	4	5	4	5	3	4	5	5

32	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	5	4	4	3	4	5	5
34	4	3	4	4	3	4	3	3
35	4	4	4	3	4	4	4	4
36	4	4	4	4	5	4	4	4
37	4	4	4	3	3	4	4	4
38	4	5	4	3	4	4	5	5
39	4	4	4	3	4	4	4	4
40	4	4	4	3	5	4	4	4
41	5	5	5	3	5	5	5	5
42	3	3	3	4	4	3	3	3
43	3	3	3	1	4	3	3	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4
45	3	4	3	2	3	3	4	4
46	5	3	5	3	3	5	3	3
47	4	4	4	2	4	4	4	4
48	5	3	5	3	5	5	3	3
49	5	4	5	4	3	5	4	4
50	4	4	4	3	3	4	4	4
51	4	4	4	1	3	4	4	4
52	5	4	5	1	3	5	4	4
53	3	3	3	4	4	3	3	3
54	1	3	3	1	4	1	3	3
55	4	3	4	3	2	4	3	3
56	1	4	3	1	3	1	4	4
57	2	1	2	1	2	2	2	2
58	1	1	1	1	3	1	3	3
59	4	5	4	3	4	4	5	5
60	1	1	1	1	3	1	4	4
61	3	3	3	4	4	3	3	3
62	4	3	4	2	2	3	3	3
63	2	2	2	1	4	1	2	2
64	4	3	4	2	4	3	3	3
65	4	4	4	3	4	4	3	4
66	2	2	2	4	2	2	1	2
67	4	4	4	3	4	4	3	4
68	2	4	2	1	2	2	4	4
69	4	5	4	2	4	4	5	5
70	2	4	2	3	2	2	4	4
71	4	2	1	3	4	4	2	2
72	4	5	1	4	4	4	5	5

7	2	2	2	2	2	2	2	3
8	2	2	2	2	2	2	2	2
9	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	2	1	3
11	1	1	1	1	3	1	1	1
12	2	2	2	2	2	2	2	2
13	2	2	2	2	2	2	2	2
14	2	2	2	2	2	1	2	2
15	3	3	3	3	3	3	3	3
16	1	1	3	3	3	1	1	3
17	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	3	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4
22	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1
24	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4
26	5	5	5	5	5	5	5	5
27	4	4	4	4	4	4	4	4
28	5	3	5	5	5	5	3	5
29	4	4	4	4	4	3	4	4
30	4	3	4	4	4	4	3	4
31	4	5	4	4	4	3	5	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	5	4	4	4	4	5	4
34	4	3	4	4	4	4	3	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	5	4	4	4	4	5	3
39	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4
41	5	5	5	5	5	5	5	5
42	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4
45	3	4	3	3	3	3	4	3
46	5	3	5	5	5	5	3	5
47	4	4	4	4	4	4	4	4

48	5	3	5	5	5	5	3	5
49	5	4	5	5	5	5	4	5
50	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4
52	5	4	5	5	5	3	3	5
53	3	3	3	3	3	3	3	3
54	1	3	3	3	3	1	3	3
55	4	3	4	4	4	4	3	4
56	1	4	3	3	1	1	3	3
57	2	2	2	2	2	2	2	2
58	1	3	1	1	1	1	3	1
59	4	5	4	4	4	4	5	4
60	1	4	1	1	1	1	4	1
61	3	3	3	3	3	3	3	3
62	4	3	4	4	4	4	3	4
63	2	2	2	2	2	2	2	2
64	4	3	4	4	4	4	3	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4
66	2	2	2	2	2	2	2	2
67	4	4	4	4	4	4	3	4
68	2	4	2	2	2	2	4	2
69	4	5	4	4	4	4	5	2
70	2	4	2	2	2	2	4	2
71	4	2	4	4	4	4	3	4
72	4	5	4	4	4	4	1	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4
74	1	4	1	1	1	1	4	1
75	2	5	2	2	2	2	5	2
76	5	3	5	5	5	5	1	4
77	4	5	4	4	4	4	5	4
78	5	4	5	5	5	5	4	5
79	4	5	4	4	4	4	5	4
80	1	5	3	3	1	1	5	3
81	4	4	4	4	4	4	4	3
82	4	3	4	4	4	4	2	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4
84	1	4	1	1	2	2	1	2
85	2	5	2	2	2	2	5	2
86	4	2	4	4	4	4	2	2
87	4	4	4	4	4	4	4	3
88	1	4	1	1	1	1	4	1

89	4	5	4	4	4	4	5	3
90	4	4	4	4	4	4	4	4
91	5	5	5	5	5	5	5	4
92	1	1	3	2	1	3	1	1
93	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	5	4	4	4	4	5	4
95	3	3	3	3	3	3	3	3
96	5	4	5	5	5	5	4	5
97	4	3	4	4	4	4	3	4
98	5	5	5	5	5	5	5	5
99	5	4	5	5	5	5	4	5
100	2	3	1	3	4	2	4	1

Lampiran SPSS

Data X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.895	.896	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	23.5700	41.278	.847	.980	.865
VAR00002	23.5100	43.323	.726	.819	.877
VAR00003	23.6300	43.427	.708	.652	.879
VAR00004	24.0600	44.178	.565	.341	.894
VAR00005	23.5700	50.066	.316	.176	.913
VAR00006	23.5900	41.012	.848	.978	.865
VAR00007	23.4100	45.315	.687	.885	.882
VAR00008	23.4500	44.109	.754	.821	.876

Data Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.956	.955	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	24.0200	51.515	.945	.960	.943
VAR00002	23.8100	59.085	.612	.778	.963
VAR00003	23.9300	53.015	.935	.977	.944
VAR00004	23.9200	52.983	.953	.984	.943
VAR00005	23.9300	53.318	.908	.946	.946
VAR00006	24.0300	52.777	.900	.917	.946
VAR00007	23.9200	59.084	.567	.778	.966
VAR00008	24.0300	54.595	.862	.823	.949

Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,591	1,054		4,357	,000
	X	,818	,037	,913	22,211	,000

a. Dependent Variable: Motivasi_WP

Uji Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,913 ^a	,834	,833	3,08206

a. Predictors: (Constant), Modernisasi_perpajakan